

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang luas dengan ribuan pulau dan kekayaan sumber daya didalamnya. Sumber daya tersebut dianggap sebagai suatu anugrah bagi suatu negara. Dengan sumber daya yang melimpah maka dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan ekonomi daerah meliputi pembentukan lembaga-lembaga baru dan tumbuhnya sektor-sektor alternatif. Pemerintah daerah dan masyarakat ikut serta dalam hal memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga akan terbentuk suatu pola kerjasama antara daerah dan swasta. Isu mendasar pembangunan daerah seringkali berupa kebijakan daerah yang didasarkan pada ciri khas daerah dengan menggunakan berbagai sumber daya daerah, baik manusia, kelembagaan, maupun sumber daya fisik. Teori lokasi, teori tempat pusat, teori sebab-akibat kumulatif, dan teori tarik-menarik adalah beberapa yang dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 2010).

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah, perlu adanya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta partisipasi masyarakat agar program dan kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi dapat berjalan efektif dan efisien. Maka perencanaan dan implementasi pembangunan yang ada di daerah maupun nasional harus terintegrasi agar mampu mendorong dan berinovasi untuk mendukung naiknya

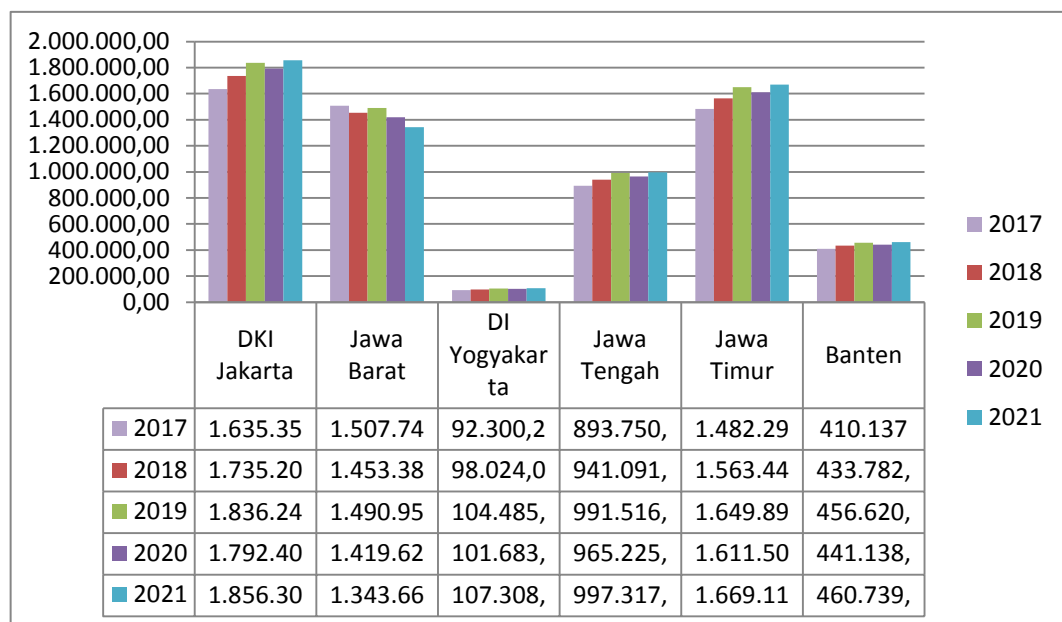
pertumbuhan ekonomi. Dampak nyata dari keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan timbul efek limpahan yang bersifat positif (spread effect) untuk wilayah sekitarnya (Saniman et al., 2023).

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar taraf hidup masyarakat meningkat. Taraf hidup yang dimaksud bisa berupa meningkatnya kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat yang tinggi, serta memperkecil kesenjangan antara masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka perlu perencanaan yang didasari oleh kajian dan informasi berbagai data dan indikator sosial ekonomi. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan indikator dari pertumbuhan wilayah. Besaran pendapatan daerah serta pendapatan rata-rata masyarakat setempat digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan masyarakat. Indikator lain yang sangat terkait dengan peningkatan pendapatan daerah adalah peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah (Tarigan, 2005).

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebisa mungkin mengarah pada perkembangan yang selaras atau memberikan keuntungan bagi daerah dan memperkecil terjadinya hambatan yang merugikan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Tanda pembangunan suatu wilayah berjalan dengan baik adalah pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah bisa dikatakan mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi jika wilayah ini menghasilkan barang dan jasa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB adalah indikator ekonomi yang paling sering digunakan untuk mengukur naiknya ekonomi. PDRB adalah jumlah total barang dan jasa yang diproduksi di

suatu wilayah selama periode waktu tertentu, biasanya setahun. PDRB diperoleh dari nilai tambah yang diciptakan setiap sektor yang kemudian dijumlahkan dan hasilnya merupakan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar

(**Grafik 1.1 PDRB Provinsi se Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Jawa Timur,2023

Perolehan PDRB yang besar mengindikasikan terjadi aktivitas produksi yang masif sehingga ekonomi di daerah menggeliat. Dari data yang dilansir oleh BPS. Jawa Timur merupakan provinsi yang menempati posisi ketiga dalam perolehan PDRB di Indonesia. besaran PDRB Jatim pada tahun 2021 yaitu Rp. 1.669,12 triliun, jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14.48% dari seluruh PDB Indonesia. PDRB Jatim 2021 naik sekitar 4,59% dibanding tahun 2020.

Pembangunan yang telah di Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari peran Badan Koordinasi Wilayah. Badan Koordinasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Bakorwil) Provinsi Jawa Timur dibentuk oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016. Salah satu tujuan dibentuknya badan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Di dalam Perda tersebut membagi Provinsi Jawa Timur kedalam 5 Bakorwil. Pembagian bakorwil tersebut bisa dilihat di tabel 1.1

Tabel 1. 1 Lingkup Wilayah Kerja Bakorwil Jawa Timur

Bakorwil	Wilayah Kedudukan	Wilayah Kerja
Bakorwil 1	Kota Madiun	Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, dan Kota Madiun
Bakorwil 2	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang , Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kota Mojokerto.
Bakorwil 3	Kota Malang	Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Pasuruan
Bakorwil 4	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan. Kabupaten Bangkalan
Bakorwil 5	Kabupaten Jember	Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Probolinggo

Sumber : Perda Jawa Timur Nomor 16 tahun 2016

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang merupakan periode keempat dari RPJPD Jawa Timur menerapkan strategi yang sektoral mengutamakan kewilayahan daripada sektoral yang dikenal dengan *From Sectoral to Spatial Approach*. Dalam pendekatan spasial keterkaitan daerah adalah hal yang sangat fundamental agar tujuan dari pembangunan tercapai. Dalam hal ini, perbedaan sumber daya yang dimiliki antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya bukanlah menjadi hambatan dalam pembangunan

daerah. Tetapi, menjadi penggerak dari pusat pertumbuhan bagi kota di belakangnya, yang membutuhkan sumber daya dari daerah di belakangnya dan menawarkan berbagai fasilitas atau kebutuhan bagi daerah di belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya.

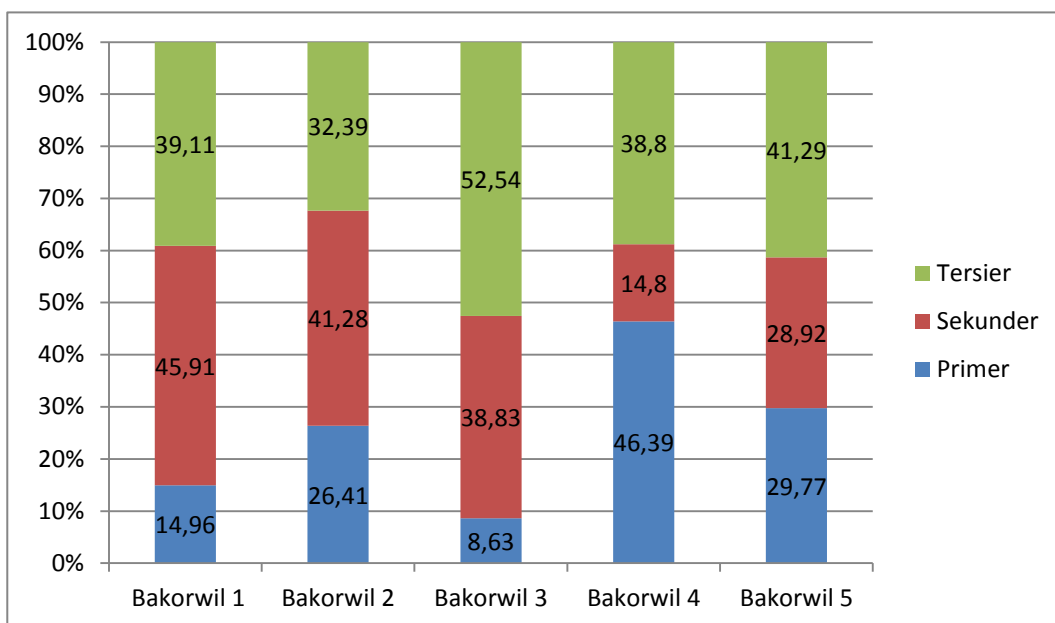
Untuk mewujudkan tujuan dari RPJPD Jawa Timur terdapat kebijakan yang mendukung pengembangan wilayah khususnya kawasan Bakorwil III yaitu dengan kegiatan prioritas Pembangunan Megapolitan Surabaya Malang (Mega Suma), Realignment jalur Malang-Blitar, Jalan Tol Pakis Kepanjen serta koridor 4.0 Surabaya-Malang. Dengan adanya proyek infrastruktur ini diharapkan akan semakin meningkatkan keterkaitan daerah.

Menurut Friedman (1979) bahwa dalam kewilayahan terdapat hirarki yang disebut sebagai teori daerah inti. Teori ini membagi hirarki kewilayahan menjadi tiga bagian yaitu core, pheriperi, dan hinterland. Hirarki yang pertama yaitu core atau inti merupakan daerah pusat dengan kota-kota besar, metropolis, dan megapolis. Lalu hirarki yang kedua yaitu pheriperi merupakan daerah peralihan yang relatif statis, sedangkan daerah hinterland adalah daerah belakang yang umumnya menerima dampak dari proses pembangunan di daerah inti. Masing-masing dari tingkat hirarki ini memiliki spesialisasi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu kesatuan dari kewilayahan. Misalnya di daerah inti umumnya merupakan perkotaan besar dengan berbagai fasilitas didalamnya sehingga daerah inti spesialisasi struktur ekonominya biasanya didominasi oleh sektor tersier. Lalu di bagian hinterland merupakan daerah belakang yang biasanya berupa kabupaten dan spesialisasi struktur ekonominya didominasi oleh sektor primer.

Secara umum, struktur sektor ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 jenis: yaitu sektor primer merupakan sektor yang mengolah langsung sumber kekayaan alam yang ada seperti tanah, laut, dan semua yang ada didalamnya. Sektor primer ini meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan pengolahan. Sektor primer ini umumnya langsung menjual hasil dari kekayaan alam dalam keadaan mentah sehingga minim nilai tambah. Kemudian sektor sekunder adalah sektor yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sektor sekunder ini meliputi sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah, dan sektor konstruksi. Umumnya sektor sekunder memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dari sektor primer.

Sedangkan sektor tersier adalah sektor yang hasil produksinya bukan berupa fisik namun berupa jasa, sektor sekunder ini meliputi sektor perdagangan besar dan eceran reparasi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor informasi komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan pertanahan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya.

Grafik 1. 2 Kontribusi Sektoral Bakorwil III tahun 2019-2022 (Persen)

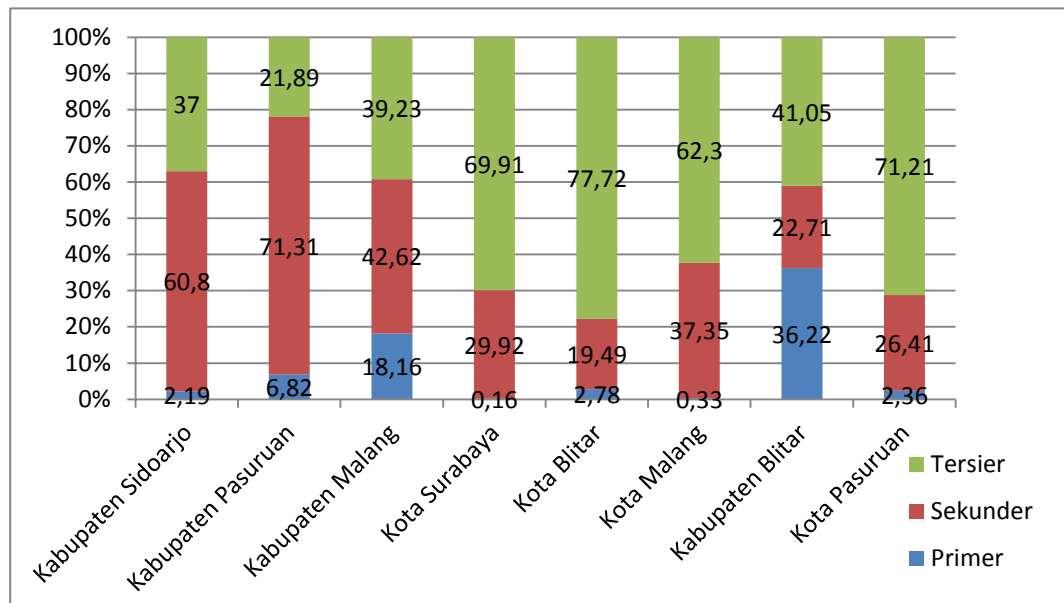


Sumber : BPS, 2023

Dalam grafik 1.2 dapat dilihat bahwa di bakorwil III komposisi antara sektor primer, sekunder, dan tersier sangat timpang, sektor tersier di bakorwil III berkontribusi sekitar 52% artinya mengindikasikan bahwa mayoritas kabupaten/kota di bakorwil III sektor jasa merupakan yang terbesar sedangkan sektor primer di bakorwil III sangat kecil.

Dalam grafik 1.3 dapat terlihat bahwa kabupaten/kota di Bakorwil III memiliki karakteristik yang struktur ekonomi yang sama yaitu sektor tersier. Jika pada teori Friedman kabupaten/kota memiliki spesialisasi tersendiri sesuai dengan fungsinya baik itu sebagai core, periferi, maupun hinterland. Hal tersebut tidak terjadi di bakorwil III, semua kabupaten/kota di bakorwil III struktur ekonominya sama sehingga jika dilihat dalam perspektif teori Friedman kondisi ini tidak ideal.

Grafik 1. 3 Kontribusi Sektoral Bakorwil III tahun 2019-2022 (Persen)

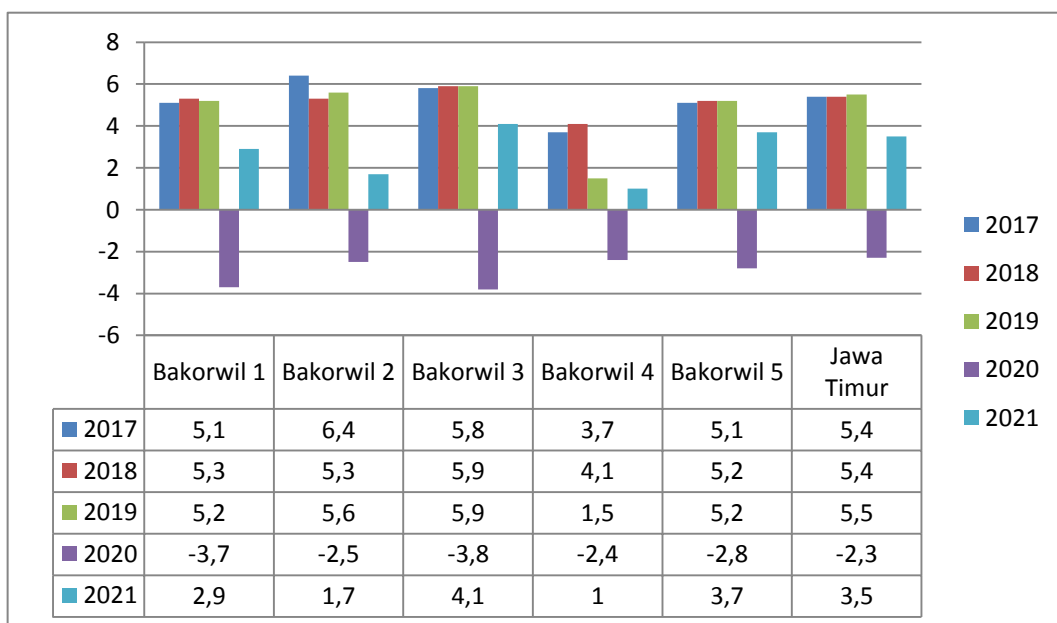


Sumber : BPS, 2023

Setiap daerah tentunya mempunyai kesadaran terhadap potensi dan kemampuan daerah masing-masing. Hal ini menjadi penting ketika suatu daerah dapat tumbuh bersama selaras dengan potensi dan kemampuannya. Daerah dengan kesamaan sektor ekonomi seperti kabupaten/kota di Bakorwil III merupakan sebuah tantangan dalam pembangunan. Maka penting untuk melihat interaksi spasial di kabupaten/kota di Bakorwil III dalam menghadapi kesamaan sektor ekonomi di kabupaten/kota Bakorwil III. Interaksi spasial adalah hubungan saling mempengaruhi antara dua daerah atau lebih yang sifatnya timbal balik (resiprocal relationship) dan dampak yang muncul akibat interaksi tersebut dapat berupa gejala, kenampakan, maupun permasalahan baru. Maka koordinasi sangat diperlukan agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan meminimalisir hambatan yang ada. Sehingga dampak yang muncul dari interaksi spasial berupa sinergi yang akan memicu kemajuan secara bersamaan (Fudhail et al., 2021).

Batten dalam Kuncoro (2012) berpendapat bahwa hubungan dua daerah atau lebih yang berdekatan akan mendapat keuntungan berupa sinergi pertumbuhan daerah yang interaktif apabila terdapat interaksi spasial yang terjadi, walaupun sebelumnya daerah tersebut berdiri sendiri dan independen. Hukum Tobler I menyatakan keterkaitan dan interaksi akan lebih kuat pada daerah yang secara jarak berdekatan satu sama lain dibandingkan dengan daerah yang jaraknya saling berjauhan. Wilayah yang mempunyai hubungan spasial atau interaksi keruangan akan dipengaruhi oleh keterkaitan wilayah.

Grafik 1. 4 Pertumbuhan PDRB Antar Bakorwil Jawa Timur 2017-2021



Sumber : BPS, 2022

Pada grafik 1.4 terlihat perbandingan pertumbuhan PDRB antar bakorwil. Dapat dilihat bahwa di Bakorwil III angka pertumbuhan merupakan paling besar dibanding dengan bakorwil lainnya, sehingga menarik untuk melihat interaksi spasial sektor ekonomi yang terjadi di bakorwil III. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “Analisis Interaksi Spasial Antar Kabupaten/Kota di Bakorwil III Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan agar penelitian tidak melebar dari rumusan masalah yang telah maka penelitian ini akan fokus pada interaksi antar kabupaten/kota di Bakorwil III Provinsi Jawa Timur. Data yang dipakai melingkupi PDRB antar daerah di kabupaten/kota Bakorwil III.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keterkaitan spasial antar kabupaten kota di Bakorwil III?
2. Bagaimana hubungan timbal balik antar kabupaten kota di Bakorwil III?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterkaitan spasial antar kabupaten/kota di Bakorwil III.
2. Untuk mengetahui hubungan timbal balik antar kabupaten kota di Bakorwil III.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diuraikan:

1. Manfaat teoritis : mampu/bisa menjadi bahan perkembangan keilmuan ekonomi, khususnya pada ilmu ekonomi regional.
2. Manfaat Praktis : hasil penelitian diharapkan agar menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Bakorwil III dan lainnya di Jawa Timur dalam membuat perencanaan terkait dengan perencanaan pembangunan.